

TAJUK RENCANA

Meredam Kegaduhan di KPK

DALAM pekan-pekan terakhir ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Paling tidak, ada dua isu yang menjadi perhatian masyarakat, yakni terkait dengan pencopotan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Pol Ender Priantoro dan bocornya Sprinlidik kasus tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM.

Kasus yang disebut terakhir ini ditanggapi secara sederhana oleh Wakil Ketua KPK Alexander Sumarwata bahwa bocornya Sprinlidik tukin tidak berdampak apa-apa bagi penegakan hukum. Nyatanya penanganan kasus tersebut terus berjalan hingga saat ini dan telah ditetapkan 10 tersangka (KR 10/4). Ia pun berk-ilah, sebenarnya kasus tukin penyelidikanannya besifat terbuka sehingga tak bedampak apapun.

Untuk hal yang demikian, tentu kita sangat prihatin, mengapa Sprinlidik bisa bocor, bahkan sampai kepada yang pihak yang berperkara. Era KPK sebelumnya, di bawah kepemimpinan Abraham Samad, pernah juga Sprindik bocor ke wartawan, namun bukan kepada pihak yang berperkara. Tentu masalahnya bukan hanya dampak dari bocornya sprinlidik maupun sprindik, melainkan lebih pada mengapa dokumen yang bersifat rahasia itu bisa bocor.

Dari sini mestinya menjadi bahan evaluasi bagi KPK untuk lebih ketat mengamankan dokumen rahasia, hal ini juga terkait dengan pembinaan SDM secara internal. Publik tentu tidak gampang percaya bahwa pembocoran itu tidak berdampak apa-apa, sebagaimana disampaikan Alexander Sumarwata, apalagi bocornya kepada pihak yang berperkara. Benarkah tidak ada motif di balik pembocoran tersebut ?

Sedang persoalan yang tak kalah menarik terkait pencopotan Brigjen Pol Ender Priantoro yang disebut-sebut terkait dengan penanganan kasus Formula E. Seperti diketahui, yang bersangkutan masuk dalam tim yang menangani kasus Formula E.

Namun sejauh ini, berdasar pengakuan yang bersangkutan, kasus tersebut belum layak dinaikkan statusnya menjadi penyidikan, lantaran tidak ada bukti yang kuat.

Pernyataan tersebut langsung dibantah Juru Bicara KPK Ali Fikri yang menyebut pemberhentian Brigjen Pol Ender Priantoro tak terkait dengan kasus Formula E. Menurutnya pemberhentian itu hanyalah rotasi biasa. Sampai pada titik ini, lagi-lagi publik dibuat bingung lantaran reaksi atas pemberhentian Ender tidak biasa.

Ender pun melawan, dan mengadukan Ketua KPK Firlil Bahuri ke Dewas KPK, karena tidak menyebut alasan pemberhentian dirinya. Tak hanya itu, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo juga tidak mau begitu saja menerima penyerahan atau penghadapan Brigjen Ender ke institusi Polisi. Dalam surat balasannya kepada KPK Firlil Bahuri 3 April 2023, Kapolri kembali menugaskan Ender sebagai Direktur Penyelidikan di KPK. Namun surat tersebut diabaikan Firlil.

Konflik terbuka antara Ketua KPK Firlil Bahuri dengan Kapolri Sigit Listyo Prabowo pun tak bisa lagi ditutup-tutupi, sehingga Presiden Jokowi angkat bicara agar mutasi di tubuh KPK tak bikin gaduh, tapi harus didasarkan pada aturan dan SOP masing-masing insitusi. Pernyataan Presiden ini mestinya direspon Ketua KPK Firlil Bahuri dengan bijak dan benar. Bagaimanapun langkah Firlil Bahuri telah menimbulkan kegaduhan, apalagi mencopot jabatan strategis di institusinya tanpa ada penjelasan. Sudah seharusnya Firlil meredam kegaduhan ini sebagaimana mengingatkan Presiden Jokowi.

Agar isu tidak berkembang liar, selayaknya Ketua KPK Firlil Bahuri menerima saran Presiden untuk tidak bikin gaduh. Firlil harus menjelaskan secara gamblang mengapa ia mencopot Ender, pun mengapa tidak merespons positif surat Kapolri tentang penugasan kembali Ender sebagai Direktur Penyelidikan di KPK. □-d

Calistung Bikin Bingung?

Sudaryanto - Jauharotul Farida

(lewat bernyanyi, mendongeng, dll.).

Kedua, orang tua dan guru PAUD/TK dapat mengikuti pelatihan pengasuhan stimulasi calistung dari pihak kampus/LPTK. Lewat pelatihan itu, orang tua dan guru dapat sama-sama praktik simulasi bermain calistung. Kelak, praktik itu dapat dilaksanakan di



KR-JOKO SANTOSO

rumah dan sekolah. Pelan tapi pasti, persepsi orang tua dan guru PAUD/TK dapat berubah bahwa konsep calistung siswa TK/PAUD berbeda dengan konsep calistung siswa SD.

Ketiga, buku-buku bacaan bagi siswa kelas awal SD, terutama kelas I, masih dinilai berat dan jauh dari semangat calistung. Demikian juga soal-soal ujian, baik evaluasi tengah semester maupun evaluasi akhir semester dari Dinas Pendidikan terkait. Untuk itu, pihak SD, terutama guru kelas I, dapat membuat buku bacaan dan soal ujian yang ramah calistung bagi siswa kelas I.

Keempat, guru-guru di PAUD/TK dan SD, terutama kelas I, dapat berkreasi pembelajaran calistung. Di PAUD/TK,

Kompetensi Pejabat Publik

Despan Heryansyah

RAPAT Komisi III DPR RI dan Menkopolkukam disaksikan jutaan mata. Dan berhari-hari isi dan konten pembicaraan dalam rapat itu trending di hampir semua platform media sosial. Sekalipun Rapat antara DPR dan Menteri atau pejabat negara lainnya memang hal yang biasa terjadi, kali ini menyita banyak perhatian karena materinya yang membahas penyimpangan uang rakyat hingga R p349 triliun. Apalagi rapat penuh dengan retorika dan perdebatan panas.

Pada satu sisi, rapat itu mendapatkan atensi publik karena keberanian Menkopolkukam mendebat hampir semua anggota Komisi III. Ini sangat mewakili keinginan publik yang sampai detik ini menaruh ekepercayaan buruk terhadap DPR. Rapat ini juga membuka fakta lama yang secara terang-terangan disampaikan ke publik, misalnya tentang bagaimana usulan pembuatan undang-undang yang keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat, namun tidak kunjung dibahas dan disetujui oleh DPR. Karena semua anggota DPR sangat bergantung pada petunjuk ketua partai politik, bukan kepada rakyat.

Standar Kompetensi

Fakta yang sesungguhnya sangat merendahkan kedaulatan rakyat, demokrasi, dan hak asasi manusia. Bagaimana mungkin orang yang bekerja dipilih oleh rakyat, digaji uang rakyat, dan bekerja atas nama rakyat namun mengabdikan hidupnya dengan harga mati, kepada petunjuk ketua partai? Belum lagi fakta keberadaan makelar kasus, makelar pasal, dan makelar undang-undang di internal DPR. Rasa-rasanya dapat dipastikan sampai hari ini masih ada. Bahkan bisa jadi banyak jika dikorelasikan dengan produk undang-undang yang disahkan belakangan ini.

Namun demikian, di luar semua itu, sejatinya ada fenomena lain yang patut kita apresiasi. Tentu saja perkembangan pers dan keterbukaan informasi publik adalah yang pertama. Karena tidak terbayangkan jutaan masyarakat Indonesia dapat secara langsung menyaksikan rapat itu, tanpa harus hadir langsung di Jakarta. Tentu tidak kalah pentingnya adalah mengenai Kompetensi Pejabat Publik.

Pertama, ini menunjukkan bahwa menjadi anggota DPR tidaklah mudah, tidak cukup memperoleh suara memenuhi ambang batas keterpilihan, lalu duduk diam atas nama rakyat. Ada standar kompetensi yang harus dimiliki, agar dapat betul-betul menjadi wakil rakyat yang sebenarnya. Kompetensi itu setidaknya adalah kompetensi untuk menyuarakan pihak yang diwakilinya, kompetensi memperjuangkan suara pihak yang diwakilinya. Juga kompetensi menjalankan kewenangannya sebagai anggota DPR.

Dengan demikian, tidak cukup seorang artis misalnya, memaanfaatkan ketenarannya untuk mendulang elektabilitas lalu mendapatkan suara terbanyak semata. Ia juga harus melayakkan diri agar memiliki kompetensi sebagaimana di atas. Namun jangan lupa, sebagai wakil rakyat dan pejabat publik, ada standar kompetensi yang harus dipenuhi.

Pelajaran Penting

Kedua, begitupun halnya dengan menjadi seorang menteri. Sejatinya ini adalah pelajaran penting bagi siapapun partai poli-

pembelajaran calistung lewat kegiatan sentra/blok tiap hari yang berbeda. Di SD, pembelajaran calistung melalui kegiatan *market day*, pementasan drama, mendongeng, lomba menulis puisi, lomba menulis cerita pengalaman, dll. Variasi kegiatan pembelajaran calistung dapat menghindari siswa dari rasa bosan, takut, kaku.

Sudah Bulat

Beberapa catatan di atas semoga membuat calistung tidak bikin bingung. Apabila keputusan Mendikbudristek tentang penghapusan tes calistung sudah bulat, sebaiknya dapat diikuti dengan pembuatan regulasi di tingkat daerah. Di PAUD/TK, selain calistung, kemampuan anak lainnya juga perlu dikembangkan. Sebagai contoh, kemampuan emosi, kemandirian, kemampuan berinteraksi.

Orang tua, guru PAUD/TK, guru SD, dan masyarakat berperan besar agar masa transisi dari PAUD ke SD dapat menyenangkan. Semua pihak dapat menaruh perhatian, kasih sayang, dan harapan kepada anak. Kita berharap, anak-anak tak hanya piawai calistung, tetapi juga piawai dalam mengelola emosi, pikiran, dan hati. Kelak, generasi muda Indonesia ke depan bertumbuh dalam kognitif, afektif, dan psikomotorik yang baik. □-d

*) *Sudaryanto MPd, Dosen PBSI FKIP UAD; Mahasiswa S-3 UNY*

*) *Jauharotul Farida SpdSi Guru SDIT Alam Nurul Islam, Yogyakarta*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

tik pemenang pemilu. Bahwa memenangkan pemilu bukan sekadar berbagi kue kekuasaan menteri belaka. Partai juga wajib memastikan bahwa kader yang mereka kirimkan adalah orang yang memiliki rekam jejak jelas mengenai tupoksi kewenangan kementeriannya. Dengan demikian, kompetensinya sebagai menteri di bidang tertentu, memang betul ia kuasai.

Menjadi menteri bukan sekadar menjadi pejabat tinggi. Menteri adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas ruang lingkup kementeriannya. Menteri pendidikan akan bertanggung jawab jika ada satu anak Indonesia yang putus sekolah. Menteri kesehatan akan bertanggung jawab jika ada satu warga negara yang meninggal karena tidak mampu berobat ke rumah sakit. Begitu seterusnya. □-d

*) *Dr Despan Heryansyah SH MH, Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum UII Yogyakarta)*

Pojok KR

KPK: Sprinlidik bocor, tidak berdampak apapun.

-- **Masalahnya, mengapa bocor ?** ***

Mendag: harga bahan pokok cenderung turun.

-- **Mudah-mudahan bukan hanya sementara.** ***

Libur Lebaran, 6 juta orang bakal masuk DIY.

-- **Bersiap Yogya macet.**

Berabe

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogo. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakiid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustuti, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subehan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrky23@yahoo.com, iklankrky13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Ishaq Zubedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lamparsari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP